

11. URUSAN KOPERASI DAN UKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan Koperasi dan UKM merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Wonosobo utamanya dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka pelaksanaan fungsi mengkoordinasikan upaya pembinaan/ pemberdayaan Koperasi dan UKM. Hal ini merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Koperasi dan UKM adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Kertek, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Leksono, Kelurahan Bumireso dan Kelurahan Wringin Anom.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan Koperasi dan UKM mendukung pencapaian Misi ke-3 yaitu Meningkatkan Kemandirian Daerah.

a. Alokasi Pendanaan

Untuk mendukung urusan Koperasi dan UKM, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 melalui APBD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.514.858.000,00. Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar Rp1.462.609.318,00 atau 96,55%. Rincian program, alokasi dan realisasi anggaran pada urusan Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.B.11.1**Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2020**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	1.514.858.000	1.462.609.318	96,55
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	185.000.000	178.064.700	96,25
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	782.500.000	737.827.550	94,29
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	130.000.000	129.759.068	99,81

III.B.11. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM

4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	417.358.000	416.958.000	99,90
---	---	-------------	-------------	-------

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Iklim usaha secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi peningkatan kinerja UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan perijinan/ pendirian usaha dan partisipasi *stakeholders* dalam pengembangan kebijakan UMKM.

Selain itu penciptaan iklim usaha yang kondusif mampu membuka peluang pasar baik di lingkup Kabupaten Wonosobo maupun di luar daerah, sehingga pelaku usaha dapat lebih mengenalkan produknya kepada masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah wirausaha baru.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program ini adalah memberikan fasilitasi pengembangan pada Usaha Mikro Kecil Menengah dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan UMKM berprestasi, mengadakan pelatihan pembuatan produk kecantikan, serta menyalurkan bantuan peralatan dan perlengkapan bantuan batik kepada Kelompok Usaha Bersama Batik "Ngaglik" Pancurwening.

Dari alokasi anggaran program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif sebesar Rp185.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp178.064.700,00 atau 96,25%.

2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

Pengembangan kewirausahaan adalah proses meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui berbagai program pelatihan dan kelas. Inti dari pengembangan kewirausahaan adalah untuk meningkatkan jumlah wirausahawan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan gairah kewirausahaan khususnya UMKM di Wonosobo dengan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha, maupun peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha bagi UMKM.

Realisasi Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program ini antara lain berupa pelatihan bagi UMKM, fasilitasi pengembangan UMKM dan peningkatan hasil produksi /omzet UMKM. Keseluruhan kegiatan ini secara nyata mendukung

penanganan Covid-19 sehingga usaha mikro kecil dan menengah tetap dapat bertahan dan menghasilkan keuntungan operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat miskin dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan berusaha yang lebih luas kepada masyarakat miskin untuk tetap berusaha meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, selain itu juga dilaksanakan pengembangan ekonomi lokal dan pengadaan 148.350 masker untuk menanggulangi Covid-19 yang dilaksanakan bekerjasama dengan Agesty Fasion, Goedang Sandang, Masyarakat para UKM di Kabupaten Wonosobo.

Kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam melaksanakan pemasaran menggunakan teknologi (pemasaran online) untuk meningkatkan omzet produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Hal ini merupakan suatu kebutuhan seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi sekarang ini.

Dari alokasi anggaran program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah sebesar Rp782.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp737.827.550,00 atau 94,29%.

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program ini untuk penyediaan lembaga pendukung bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal dan mengembangkan usaha UMKM.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah Pelatihan pembuatan Produk Pengolahan makanan serta Sosialisasi dan Monitoring ke UMKM Pengakses Dana KUR. Pelatihan pembuatan produk pengolahan makanan dimaksudkan sebagai upaya memberikan pengetahuan dan wacana cara/strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi usahanya. Wacana pelatihan pengolahan makanan ini mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemasaran dan nilai jual produk yang dihasilkan oleh masyarakat, dan diharapkan nantinya mampu memberikan *multiplier effect* yang besar pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk Pengembangan Usaha UMKM memerlukan modal usaha sehingga Pemerintah melalui Perbankan telah menyalurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk membantu UMKM menjaga keberlangsungan usahanya. Kegiatan ini dilaksanakan karena ternyata masih banyak UMKM yang belum paham mekanisme dan persyaratan untuk mengakses pemodal KUR lewat Perbankan. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan membantu UMKM mendapatkan modal usaha lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR)

guna menjaga keberlangsungan usahanya bahkan diharapkan bisa menambah kapasitas produksinya.

Dari alokasi anggaran Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar Rp130.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp129.759.068,00 atau 99,81%.

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa koperasi jelas-jelas dinyatakan sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia, untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi sangat kompleks, khususnya dalam mendorong dan membina koperasi. Wujud peran pemerintah melalui pentahapan pembinaan koperasi yang mencakup tahap ofisialisasi, tahap deofisialisasi dan tahap otonomi. Melihat hal itu peningkatan kelembagaan koperasi merupakan hal yang sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif. Dengan demikian, kelembagaan dan organisasi koperasi diharapkan akan lebih tertata dan berfungsi dengan baik, berkualitas, efektif dan mandiri. Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain pembinaan, pengawasan pengelolaan koperasi, pemberian penghargaan koperasi, serta pelatihan bagi SDM yang berkecimpung dalam perkoperasian di Wonosobo. Hal ini bertujuan memfasilitasi koperasi agar tertib administrasi dalam mengelola Lembaga dan usahanya, meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi serta meningkatkan SDM pelaku koperasi yang kreatif dan inovatif sehingga koperasi dapat semakin berkembang dan mandiri.

Kelembagaan koperasi merupakan salah satu yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dan terus-menerus agar koperasi bisa berjalan dengan baik dan memberikan kemanfaatan bagi anggotanya. Selain untuk meningkatkan jumlah koperasi yang aktif, hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan wacana dan semangat kepada koperasi agar usaha yang dilakukan tidak hanya terkait dengan simpan pinjam tetapi juga melakukan usaha lain yang lebih kreatif dan inovatif. Kondisi saat ini geliat koperasi sudah mulai terasa khususnya dengan makin banyaknya koperasi yang mempunyai usaha pertokoan yang pada awalnya adalah untuk mencukupi kebutuhan anggotanya terlebih dahulu namun kemudian berkembang untuk masyarakat di sekitarnya.

III.B.11. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM

Perkembangan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM pengurus maupun anggota koperasi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan juga menyasar kepada peningkatan SDM koperasi berbasis kompetensi serta pelatihan manajemen koperasi di Wonosobo. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam koperasi agar bisa lebih memberdayakan dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Untuk menunjang kegiatan perkoperasian di Wonosobo, serta menjaga dan meningkatkan semangat dalam berkoperasi, telah dilakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi serta pemberian penghargaan kepada koperasi yang berprestasi. Harapan yang ada adalah koperasi lebih semangat dalam menjalankan usahanya dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri, serta praktek berkoperasi yang baik semakin berkembang di kalangan masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program ini adalah mengadakan pelatihan packaging, pelatihan peningkatan produk UMKM berbahan baku lokal menjadi produk unggulan, pelatihan SDM pengawas bagi koperasi, Pelatihan akuntansi dasar bagi pengelola koperasi baru dan usaha mikro kecil, Pelatihan peningkatan ketrampilan usaha anggota koperasi yang dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo.

Dari alokasi anggaran program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi sebesar Rp417.358.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp416.958.000,00 atau 99,90%.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.B.11. 2

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM	99,79	98,82	99,5	100,69	ST	98,82
2	Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi	1,00	8,00	1,00	12,50	SR	10,00
3	Persentase kenaikan tenaga kerja UMKM	0,4	0,4	0,03	7,50	SR	0,50
4	Persentase Penambahan jumlah wirausaha baru	6,20	8	0,24	3,00	SR	10,00

III.B.11. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM**

No	Indikator Kinerja Program	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
			Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
5	Persentase koperasi terhadap jumlah UMKM	0,66	4	0,63	15,75	SR	5,00
6	Persentase kenaikan Jumlah UMKM	0,37	13,00	0,2	1,54	SR	15,00
7	Persentase kenaikan Aset UMKM (juta)	3,24	13,00	0,44	3,38	SR	15,00
8	Persentase kenaikan Omzet UMKM (juta)	5,15	13,00	-3,26	-25,08	SR	15,00
9	Persentase Koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	88,16	90,00	98,00	108,89	ST	95,00
10	Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	14,30	19,00	19,65	103,42	ST	20,00
11	Persentase UMKM memiliki perizinan	67,00	94,00	87	92,55	ST	100,00
12	Persentase kenaikan Aset Koperasi	6,10	5,80	1,29	22,24	SR	6,50
13	Persentase kenaikan Omzet Koperasi	7,41	5,80	-0,68	-11,72	SR	6,50
14	Persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif	63,00	90,00	63,00	70,00	S	100,00
15	Persentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah koperasi	66,34	73,00	66,92	91,67	ST	75,00

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	$76 \% \leq 90\%$	Tinggi	T	
3	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan capaian kinerja program urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2020 adalah sebagai berikut;

- Terdapat 15 Indikator Kinerja Program Urusan Koperasi dan UKM
- Realisasi kinerja program kategori sangat tinggi sebanyak 5 indikator (mengalami penurunan cukup banyak dari tahun sebelumnya, dimana kategori sangat tinggi pada tahun 2019 sejumlah 10 indikator)
- Realisasi kinerja program kategori sedang, rendah dan sangat rendah sebanyak 10 indikator (mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana kategori sedang, rendah, sangat rendah pada tahun 2019 sejumlah 5 indikator)

Pencapaian kinerja urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo dapat dicerminkan melalui lima belas indikator di atas. Sebagian besar indikator tersebut mengalami penurunan skala capaian dibandingkan dengan tahun lalu, kecuali pada empat indikator dimana pada tahun 2020 ini tetap mendapat skala Sangat Tinggi, yaitu persentase koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, persentase UMKM yang memiliki perizinan, serta persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif.

Persentase koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan pada tahun 2020 sebesar 98%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 88.16 %. Namun, peningkatan tersebut tidak sejalan dengan kenaikan pencapaian tenaga kerja koperasi yang hanya sebesar 1%, kenaikan capaian asset koperasi yang hanya sebesar 1,29%, bahkan capaian omset koperasi *under target* yaitu -0,68. *Inconsistency* ini disebabkan karena situasi di luar prediksi, yaitu Pandemi Covid-19. Pembiayaan yang diperoleh koperasi

biasanya digunakan untuk membeli stok barang maupun alat penunjang koperasi, namun dikarenakan situasi Pandemi Covid-19, preferensi stok barang dan alat penunjang menjadi kurang relevan. Selain itu, anggota koperasi kurang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pada koperasi yang bersangkutan. Ditambah daya beli konsumen secara umum yang menurun serta preferensi masyarakat yang berubah dan lebih menyukai belanja *daring*, menjadikan *volume* penjualan semakin berkurang. Namun di satu sisi, beban dan tagihan biaya tetap harus dibayarkan.

Di sisi lain, strategi bisnis dan pengelolaan koperasi belum mampu beradaptasi secara cepat (*agile*) dengan berbagai perubahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan melakukan penyesuaian pada kondisi yang terus mengalami perubahan dan ketidakpastian membutuhkan kemampuan dan kompetensi khusus. Oleh karena itu, di tahun-tahun mendatang diperlukan ada perubahan strategi bisnis koperasi agar dapat bersaing dengan jenis usaha lini sejenis, serta pelatihan peningkatan kreatifitas dan inovasi program koperasi yang dapat meningkatkan partisipasi anggota koperasi dalam berbagai peran tidak hanya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Ketidakkonsistenan peningkatan indikator berikutnya pada capaian persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan pada tahun 2020 sebesar 19,65%, mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 hanya sebesar 14,3%. Namun, peningkatan ini tidak sejalan dengan capaian kenaikan tenaga kerja UMKM yang hanya sebesar 0,03% capaian kenaikan jumlah UMKM yang hanya sebesar 0,2%, capaian kenaikan aset UMKM yang hanya sebesar 0,44%, bahkan kenaikan omzet UMKM mengalami *under target* yaitu dengan capaian hanya sebesar -3,26% pada tahun 2020. Ketidakkonsistenan terjadi karena pembiayaan yang diperoleh UMKM mayoritas digunakan untuk mempertahankan bisnis operasional karena fluktuasi ekonomi di masa Pandemi ini. Selain, beban dan tagihan harus tetap dibayarkan, biaya tambahan dalam rangka penerapan protokol kesehatan terus meningkat tanpa diimbangi adanya *cash flow* yang lancar. Hal ini disebabkan karena daya beli masyarakat cenderung menurun karena adanya pengetatan ekonomi serta preferensi konsumen yang beralih pada pembelanjaan *daring/online*.

Dengan kondisi daya saing dan kualitas produk UMKM secara umum masih rendah sehingga belum mampu menjadi pilihan utama masyarakat apabila dibandingkan produk dalam pasar *daring*. Selain itu, kondisi pengelolaan keuangan serta strategi bisnis UMKM yang diterapkan belum siap menghadapi perubahan yang begitu cepat dan *massive*. Untuk tahun-tahun mendatang, dirasa perlu adanya pendampingan pembinaan dan pelatihan dalam mengelola keuangan, pemanfaatan fasilitas internet untuk proses pemasaran, serta meningkatkan daya saing dan inovasi produk dengan membentuk kelompok *mentoring* terbimbing.

Indikator yang perlu mendapat perhatian khusus adalah persentase koperasi terhadap jumlah UMKM yaitu hanya sebesar 0,63%, masih jauh dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 4%. Perlu digarisbawahi bersama bahwa salah satu jalan untuk meningkatkan perekonomian adalah adanya kolaborasi antara koperasi dan UMKM, kolaborasi dan sinergitas ini mampu mendorong skala ekonomi usaha dalam perekonomian lokal. Indikator lainnya yang memerlukan perhatian yang lebih besar adalah kenaikan omzet UMKM malah *under target* sebesar -25,08%. Kondisi ini masih terjadi salah satunya karena pemasaran

produk UMKM yang masih berkutat di sekitar Wonosobo, sehingga jumlah produk yang dihasilkan masih terbatas. Produk UMKM masih banyak yang belum berani dipasarkan di luar daerah meskipun sebenarnya kualitas beberapa produk sudah cukup bagus. Pemasaran di luar daerah masih terbatas, bahkan ditengarai beberapa produk Wonosobo bisa dikirim ke luar daerah bahkan diekspor namun dengan merk dagang dari daerah lain. Hal ini dikarenakan masih banyak UMKM yang belum memiliki perizinan yang dipersyaratkan untuk dipasarkan di luar daerah. Disamping itu jumlah/kuantitas barang dan kontinuitas produk masih belum bisa dipenuhi oleh UMKM. Untuk meningkatkan omzet maupun aset UMKM diperlukan peningkatan kapasitas produksi UMKM serta kontinuitas/ketersediaan produk serta fasilitasi pembentukan wirausaha baru yang otomatis akan meningkatkan jumlah UMKM, baik melalui sistem magang maupun pelatihan berkelanjutan.

Pada potret lain, indikator yang mengalami peningkatan cukup menggembirakan adalah peningkatan persentase UMKM yang memiliki perizinan dimana pada tahun 2020 adalah sebesar 87%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 67%. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha serta adanya penyederhanaan dan kemudahan izin bagi UMKM melalui perizinan tunggal *Online Single Submission (OSS)*. Perizinan ini tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan perizinan berusaha, tetapi juga nantinya untuk mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi halal. Walaupun bersifat sukarela, SNI dan sertifikasi halal adalah kebutuhan penting untuk menjamin standar kualitas produk terutama UMKM yang ingin bersaing di pasar global. Perizinan sangat penting untuk disampaikan kepada UMKM melalui pengawasan, pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi kepada UMKM. Selain itu pembinaan dan pengawasan diharapkan bisa mendorong jumlah UMKM yang memenuhi standar produk yang telah ditetapkan agar kepercayaan konsumen juga akan semakin meningkat. Perlu adanya fasilitasi dari perangkat daerah terkait untuk memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada UMKM agar target tersebut bisa segera tercapai, karena hal ini akan berdampak kepada gerak langkah UMKM dalam melakukan produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan. Program yang perlu dilakukan antara lain berupa pelatihan pengelolaan usaha, peningkatan kualitas produk, standarisasi dan sertifikasi produk, pelatihan teknik produksi yang baik, pengetahuan pasar produk, legalitas usaha, serta digitalisasi UMKM.

Capaian indikator yang mengalami peningkatan berikutnya adalah indikator persentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah seluruh koperasi. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 sebesar 66.92%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 66,34%. Pembinaan dan monitoring yang dilakukan secara aktif terbukti dapat menambah jumlah koperasi aktif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi sangat penting dilaksanakan agar koperasi bisa berjalan dengan baik dan aktif, yang pada akhirnya bisa menyejahterakan anggotanya. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi semua pihak karena di satu sisi, kebutuhan akan permodalan dari UMKM bisa tersedia dan di sisi yang lain koperasi bisa mempunyai usaha yang menguntungkan serta memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Untuk itu di tahun-tahun mendatang perlu adanya perhatian yang serius untuk meningkatkan kualitas koperasi agar bisa mewarnai geliat perekonomian di Wonosobo, serta perlu dukungan

III.B.11. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM

anggaran untuk pembinaan dan pengawasan koperasi sehingga akan meningkatkan jumlah koperasi aktif di Wonosobo.

Dari capaian-capaian tahun 2020 atas, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 masih banyak indikator yang perlu diakselerasi terkait dengan indikator menyangkut koperasi maupun UMKM.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan koperasi dan UKM Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM, beberapa permasalahan dan solusi yang perlu diupayakan yaitu:

Tabel III.B.11.3.

Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Koperasi dan UMKM

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya kualitas SDM dalam melakukan diversifikasi proses pengolahan dan strategi pemasaran.	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dengan mengadakan pelatihan - pelatihan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dan penjualan produk.
2.	Pasar yang terlalu terfokus sehingga target pasar menjadi sangat sempit dan kurang meluas	Meningkatkan pemasaran di luar daerah baik melalui pameran produk maupun dengan memanfaatkan teknologi yang inovatif (internet), pemasaran <i>online</i> agar mampu bersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara
3.	Kemampuan SDM koperasi dan UMKM yang masih minim terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui BIMTEK terkait pengelolaan administrasi/keuangan koperasi/UMKM.
4.	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha UMKM untuk bermitra dalam suatu koperasi sebagai bentuk usaha meningkatkan produksi dan produktivitas produk yang dihasilkan	Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk bermitra dan berkolaborasi dalam satu koperasi untuk mempermudah dalam permodalan dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.
5.	Kurangnya pengetahuan tentang pengendalian mutu produk	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dalam produksi dan pengendalian mutu produk

III.B.11. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM**

No	Permasalahan	Solusi
6.	Suku bunga bank yang terus menurun memberikan efek berkurangnya gairah/partisipasi anggota untuk memanfaatkan dana di koperasi	Peningkatan kreativitas dan inovasi koperasi agar kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bertumpu kepada simpan pinjam saja
7.	Pandemi Covid-19 menurunkan kemampuan Koperasi dan terutama UMKM dalam mengembangkan usahanya.	Memperkuat kelembagaan koperasi dan atau UMKM serta memperluas pangsa pasar produk UMKM melalui peningkatan kualitas produk Wonosobo.